

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2009). Dengan kata lain, ketepatan dalam menentukan arah pembangunan harus mencakup segala bidang secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dalam pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target yang akan diusahakan.

Dari konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan para pakar ekonomi dunia, dimana berbagai konsep tersebut adalah mengkombinasikan berbagai faktor multidimensi dalam rangka pembangunan ekonomi untuk dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi suatu wilayah dan secara makro menjadi kemajuan suatu negara yang mana tujuan akhir dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Salah satu indikator dari keberhasilan suatu pembangunan yaitu tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu

negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu negara (Basnawi, 2017).

Dalam kontek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat maka kesejahteraan yang dimaksud antara lain adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat atau masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat, berpendidikan dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai alat dari pembangunan tersebut. Keberhasilan pembangunan manusia yang diupayakan suatu negara tercermin dari seberapa mampu negara tersebut dapat mengatasi permasalahan mendasar masyarakatnya. Masalah-masalah tersebut meliputi pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan buta huruf (Kacaribu, 2013).

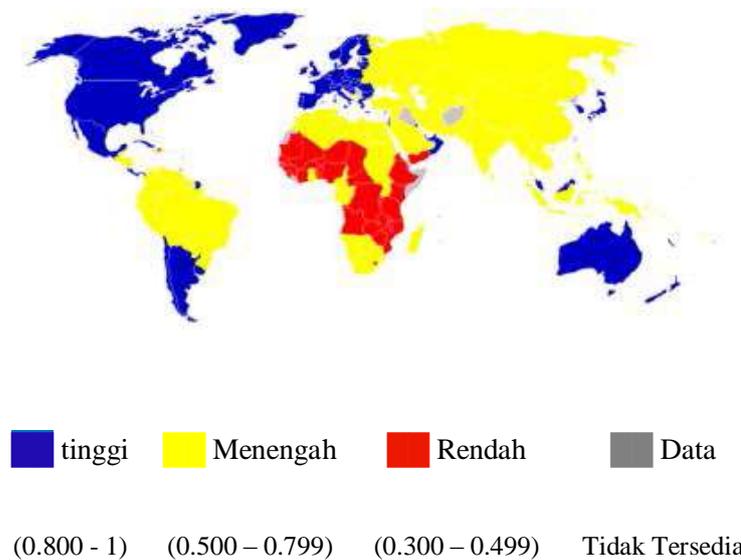
Terdapat beberapa alasan dimana pembangunan manusia sangat perlu diperhatikan, menurut Yusri (2010), dikarenakan pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal menangani masalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan juga kemiskinan. Kedua, banyak negara-negara maju yang berpendapatan tinggi namun masih belum mampu mengatasi masalah-masalah sosial seperti narkoba, penyebaran AIDS, pelecehan seksual, diskriminasi, KDRT, gelandangan dan sebagainya. Ketiga, sementara terdapat juga negara yang

masih berpendapatan rendah justru mampu mencapai pembangunan manusia yang tinggi dengan mengembangkan kemampuan dasar manusianya.

*United Nations Development Programme* (UNDP: 2015) menjelaskan pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk atau masyarakat untuk membangun hidupnya melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan juga perekonomian yang semakin membaik. UNDP menyusun atau menerbitkan suatu indikator yaitu *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur angka kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau negara yang merupakan ukuran perbandingan tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama yaitu, panjang umur dan kesehatan, yang diukur menggunakan angka harapan hidup saat lahir. Kedua pendidikan, diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup atau biasa disebut kemampuan ekonomi yang diukur menggunakan paritas daya beli (PPP) atau penghasilan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan sangat penting bagi suatu negara dalam menentukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara

penghasilan dan kesejahteraan (Irawan, 2009). IPM sendiri dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.



*Sumber : Lampiran*

### **Gambar 1.1**

*Peta Dunia Mengindikasikan Indeks Pembangunan Manusia*

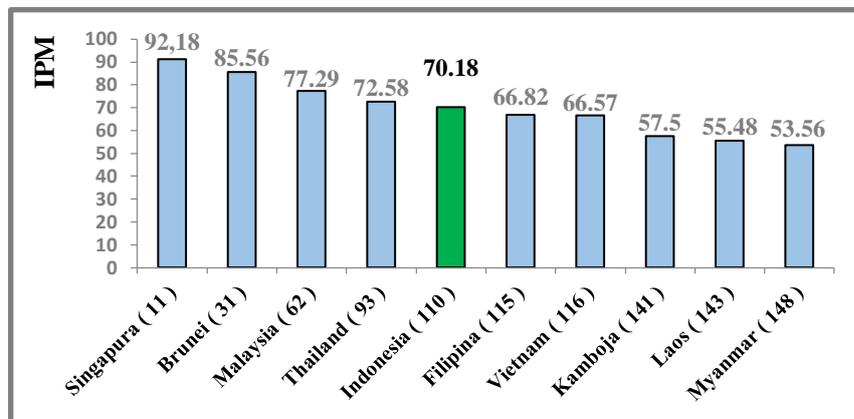
Gambar 1.1. di atas mengindikasikan indeks pembangunan manusia yang termasuk dalam laporan pembangunan manusia Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa yang dirilis pada tanggal 5 Oktober 2009. Indeks ini didasarkan pada data-data tahun 2007 yang merangkumi 180 anggota PBB dari 192 negara sebagai pembandingan tingkat indeks pembangunan manusia di dunia. Negara-Negara terbagi dalam empat kategori berdasarkan IPM-nya yaitu sangat tinggi (kategori baru yang

ditambahkan pada laporan untuk tahun 2007), tinggi, menengah, dan kategori rendah. Mulai dari laporan untuk tahun 2007, kategori IPM sangat tinggi dirujuk sebagai negara maju, sedangkan sisanya dikelompokkan sebagai negara berkembang.

Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jadi setiap daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk, adapun kategori tersebut sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80.0
- Menengah Atas : IPM 66.0-79.9
- Menengah Bawah : IPM antara 50.0-6.9
- Rendah : IPM kurang dari 50.0

*(BPS-Bappenas-UNDP, 2010).*



Sumber : UNDP, 2015

**Gambar 1.2**

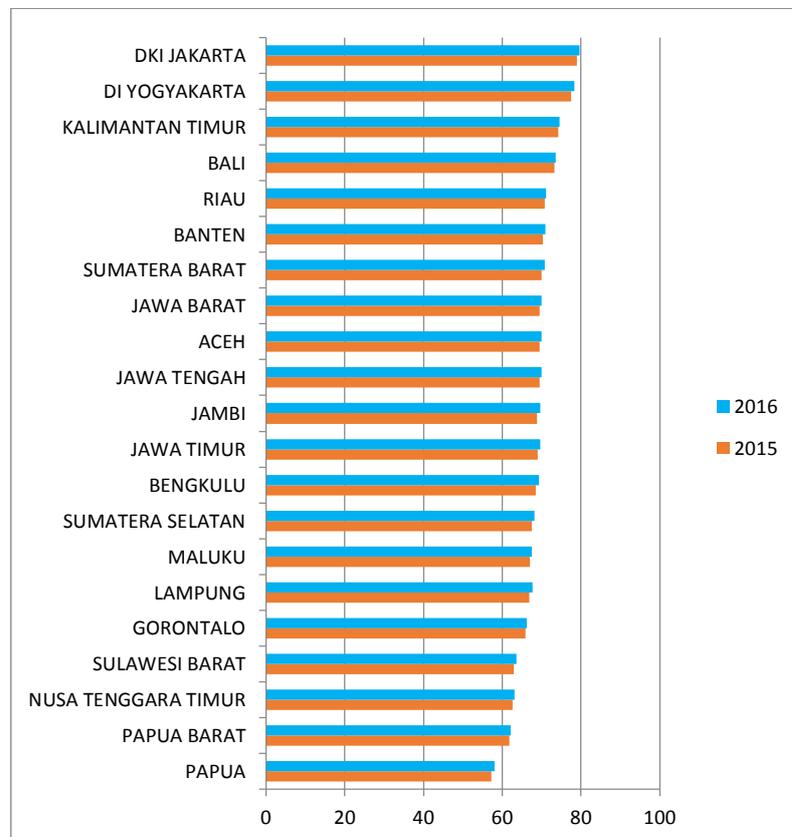
*IPM Negara-Negara ASEAN tahun 2016*

Gambar grafik 1.2. di atas merupakan gambaran nilai IPM Negara-negara ASEAN tahun 2016. IPM Indonesia sebesar 70,18 menempati posisi ke 110 di dunia dan berada di posisi ke 5 di antara negara-negara ASEAN dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. IPM tertinggi di ASEAN adalah Singapura dengan IPM 91,18 serta menempati posisi 11 IPM dunia dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan Myanmar merupakan negara dengan IPM terendah diantara negara-negara ASEAN dengan IPM sebesar 53,56. Meskipun IPM Indonesia berada di peringkat 110 dunia serta berada di posisi ke 5 ASEAN, IPM Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakatnya semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi

maupun kabupaten dan kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu adanya paradigma baru yaitu pembangunan yang mengedepankan aspek pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Rustariyuni, 2014).

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah ditingkat daerah baik provinsi atau kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk mengatur program pembangunannya. Pemerintah daerah dapat mengatur anggarannya sendiri, menetapkan upah minimum, termasuk juga mengembangkan potensi sumberdaya yang ada melalui program pembangunan manusianya. Potensi daerah yang dimaksud termasuk potensi sumberdaya manusia (SDM). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur kebijakannya dalam program pembangunan manusia, sehingga akan memacu perkembangan potensi SDM di setiap daerah itu sendiri. Dengan majunya SDM di tiap daerah akan membuat sumberdaya yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

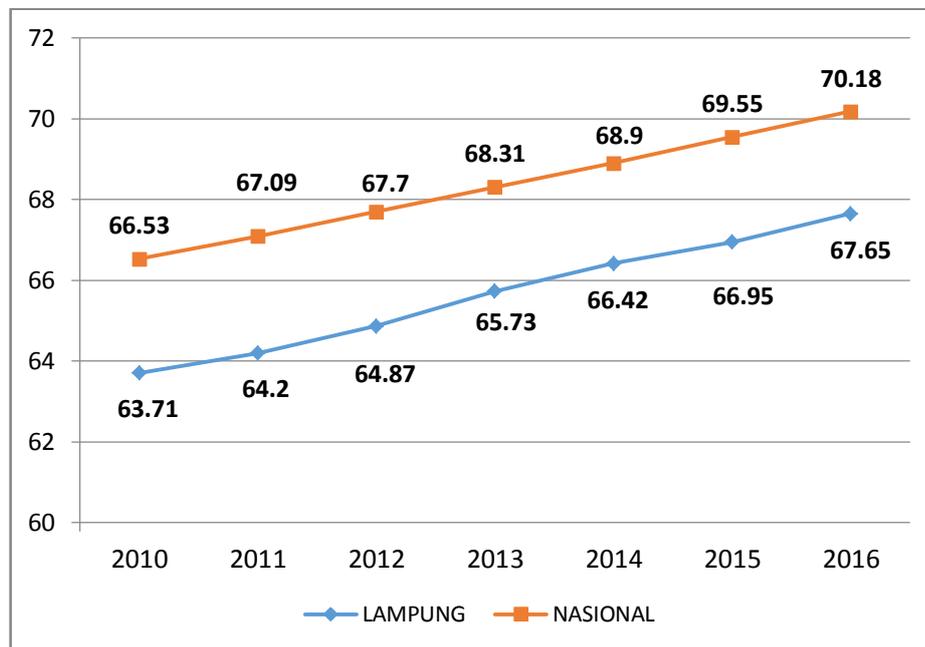


Sumber data : BPS, IPM Provinsi dan Nasional 2016

**Gambar 1.3**  
*Peringkat IPM Provinsi di Indonesia*  
*Tahun 2015-2016.*

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan IPM provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia di Indonesia. Pada tahun 2016, IPM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 79,60. Provinsi dengan PDRB per kapita mencapai 136,4 juta (ADHK 2010) di tahun 2016 ini merupakan provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Sedangkan tingkat IPM terendah adalah provinsi Papua yaitu 58,05 dengan PDRB per kapita hanya 38,9 juta (ADHK 2010) di tahun 2016.

Sementara provinsi Lampung berada di peringkat 25 Nasional dengan IPM 67,65. Walaupun IPM provinsi Lampung tidak berada di posisi terendah namun dengan peringkat 25 IPM nasional berarti bahwa pembangunan manusia provinsi Lampung masih rendah jika dibandingkan provinsi lain terutama di pulau sumatra.



Sumber : Badan Pusat Statistik, *IPM Provinsi dan Nasional 2016*

**Gambar 1.4**

Pertumbuhan IPM Indonesia dan Provinsi Lampung tahun 2010-2016

Gambar 1.4 diatas menunjukkan perhitungan IPM oleh BPS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam enam tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai 2016 IPM di Indonesia meningkat sebesar 3,02 poin. Pada tahun 2016 pencapaian IPM di Indonesia mencapai 70,18 meningkat 0,65 poin dibanding tahun 2015. Pada periode

tahun 2015-2016 pembangunan manusia tumbuh sebesar 0,94 persen, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
*Pertumbuhan IPM Indonesia dan Provinsi Lampung*  
*Tahun 2010-2016 (Persen)*

Tahun	Nasional	Lampung
2010-2011	0,84	0,79
2011-2012	0,91	1,03
2012-2013	0,90	1,09
2013-2014	0,86	1,02
2014-2015	0,94	0,97
2015-2016	0,91	0,95

*Sumber : BPS, IPM Provinsi dan Nasional 2016*

Meskipun IPM provinsi Lampung lebih rendah dibanding IPM Nasional, tetapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM Provinsi Lampung tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Nasional dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

**Tabel 1.2**  
*IPM Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra*

Provinsi	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Riau	68,65	68,9	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20
Sumatra Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73
Sumatra Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51	70,00
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,3	68,81	69,45	70,00
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,5	68,06	68,59	69,33
Sumatra Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24
<b>Lampung</b>	<b>63,71</b>	<b>64,2</b>	<b>64,87</b>	<b>65,73</b>	<b>66,42</b>	<b>66,95</b>	<b>67,65</b>

*Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2016*

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa IPM Provinsi Lampung selalu berada di posisi terendah di pulau Sumatra. Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan IPM tertinggi di pulau Sumatra yaitu 71,20. Diikuti oleh Sumatra Barat 70,73 kemudian provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh dengan indeks ipm yang sama yakni 70,00 lalu provinsi Jambi 69,62 Bengkulu 69,33 dan Sumatra Selatan 68,24. IPM provinsi Lampung merupakan yang terendah dipulau Sumatra, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia antara lain: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun meski IPM Provinsi Lampung merupakan yang terendah tetapi IPM Provinsi Lampung mempunyai tren positif membuat ranking IPM Provinsi Lampung cenderung naik dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Lampung menempati peringkat 29, kemudian naik 1 peringkat menjadi rangking 27 pada tahun 2012 dan menjadi rangking 25 nasional pada tahun 2015, meskipun terjadi kenaikan peringkat namun peringkat IPM di Provinsi Lampung masih yang terendah di pulau sumatra, berbeda dengan provinsi Riau dan Sumatra Barat yang merupakan daerah dengan IPM tertinggi di pulau Sumatra.

Wilayah provinsi Lampung merupakan wilayah yang berada di pulau Sumatra bagian paling selatan. Wilayah ini terdiri dari 14 wilayah yang terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

**Tabel 1.3**  
*IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010-2016*

Provinsi	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	60.93	61.92	62.51	63.21	63.54	64.37	65.45
Tanggamus	60.09	60.63	61.14	61.89	62.67	63.66	64.41
Lampung Selatan	61.07	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	66.19
Lampung Timur	63.23	64.10	65.10	66.07	66.42	67.10	67.88
Lampung Tengah	64.14	64.71	65.60	66.57	67.07	67.61	68.33
Lampung Utara	61.82	62.67	62.93	64.00	64.89	65.20	65.95
Way Kanan	61.27	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	65.74
Tulang Bawang	63.21	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	66.74
Pesawaran	58.64	59.44	59.98	60.94	61.70	62.70	63.47
Pringsewu	63.78	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	68.26
Mesuji	56.83	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72
Tulang Bawang Barat	59.89	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	63.77
Kota Bandar Lampung	71.11	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	75.34
Kota Metro	71.37	72.23	72.86	74.27	74.98	75.10	75.45

*Sumber : BPS Lampung 2016*

Peringkat IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung bervariasi, kota Bandar Lampung menempati posisi teratas pada tahun 2015 dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 75,10 pada tahun 2016 giliran kota metro yang berada di posisi tertinggi dengan indeks 75,45 itu lebih besar dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Lampung di tahun yang sama. Sedangkan IPM terendah di provinsi Lampung adalah Kabupaten Mesuji dengan nilai IPM 60,72 terlihat perbedaan yang sangat jauh dibandingkan kota Bandar Lampung. Dengan melihat kenyataan angka IPM di Kabupaten /Kota maka peran dan tanggung jawab yang di emban pemerintah daerah menjadi semakin penting karena dituntut untuk melakukan fungsi alokasi untuk seluruh sumber daya

yang dimiliki daerah di berbagai sektor untuk dapat meningkatkan seluruh pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat.

Tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik masyarakat sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang menjadi inti konsep pembangunan manusia. Kebijakan pengalokasian dana dibidang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum untuk setiap daerah di provinsi lampung haruslah sangat dipertimbangkan dengan seksama agar dapat tercapainya pembangunan manusia di Provinsi Lampung secara merata.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya melalui APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terus menghasilkan serangkaian perdebatan di kalangan ahli ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan dapat memicu peningkatan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output nasional. Demikian pula, pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, komunikasi, listrik, dll, mengurangi biaya

produksi, meningkatkan investasi sektor swasta dan profitabilitas perusahaan, sehingga mendorong pembangunan ekonomi (Monday *et al.*, 2014).

Salah satu komponen dalam IPM adalah indeks pengeluaran yaitu gambaran tentang kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar layak diperlukan pendapatan, pendapatan atau upah yang diperoleh oleh masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. upah minimum regional merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal disuatu daerah, sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Upah minimum juga merupakan salah satu faktor penentu bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu wilayah, terutama jika investor ingin mendirikan perusahaan atau pabrik yang akan banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Zamharir, 2016).

Tingkat upah minimum Provinsi Lampung adalah yang terendah dibandingkan provinsi lain di pulau Sumatera yakni dikisaran Rp. 1.500.000 Meskipun tergolong kategori upah minimum terendah di antara provinsi lain di pulau Sumatera, namun dengan rata-rata tingkat upah minimum ini, Tingkat IPM Provinsi Lampung bukanlah yang terendah diantara provinsi yang ada di pulau Sumatera.

Beberapa studi telah dilakukan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia seperti yang dilakukan Basuki et., al (2016). Menggunakan variabel independen pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan rentan waktu 7 tahun yakni 2008-2014. Dengan menggunakan metode data panel dan diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi DIY. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan fasilitas umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Provinsi DIY. Variabel rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM di Provinsi DIY.

Penelitian Ilyas, Paddu, dan Suhab (2013). Menggunakan variabel independen belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan tingkat pendidikan sektor pertanian dengan rentan waktu 13 tahun yakni 2001-2013. Menggunakan metode analisis *Two Stage Least Squares* dan diperoleh hasil variabel belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Kabupaten Sinjai. Variabel belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Kabupaten sinjai. Variabel tingkat pendidikan sektor pertanian berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Kabupaten Sinjai

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota di provinsi Lampung sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi Lampung memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia yang notabennya selalu terendah di pulau Sumatra. Namun walaupun demikian pertumbuhan IPM Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang relatif cepat dari tahun ke tahunnya. Selain itu tingkat IPM Provinsi Lampung yang bervariasi penulis anggap hal yang sangat menarik dan merupakan fenomena unik untuk diteliti karena IPM merupakan gambaran pencapaian kinerja dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta berkualitas yang dapat mengembangkan perekonomian suatu wilayah juga dapat menjadi parameter atau acuan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk membangun negeri.

Atas dasar latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2010-2016”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Agar penelitian ini tidak meluas, tetap terarah dan terfokus, juga mengingat factor keterbatasan yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya meneliti dan berfokus pada :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan, Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan, dan Belanja Pemerintah Daerah Bidang Fasilitas Umum di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?

3. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Bidang Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2016 ?

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi baru bagi pembaca dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama tetapi dengan metode yang berbeda.

### 2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai sumber data baru yang dapat dikembangkan lagi dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia.